



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

SUBSIDI ENERGI DAN TRANSISI ENERGI INDONESIA

Hilma Meilani
Peneliti Muda
hilma.meilani@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Gejolak harga energi global berdampak terhadap harga komoditas energi di Indonesia. Komoditas energi dalam negeri yang mengalami penyesuaian harga antara lain adalah harga jual *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) nonsubsidi per 27 Februari 2022, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamina per 1 April 2022, dan Bahan Bakar Gas (BBG) per 1 Mei 2022. Lonjakan harga energi di pasar global juga memberi tekanan besar bagi keuangan negara. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 pemerintah telah mengalokasikan total anggaran subsidi sebesar Rp206,96 triliun. Anggaran tersebut untuk subsidi energi sebesar Rp134,03 triliun (7,2 persen dari APBN tahun 2022), dan subsidi nonenergi sebesar Rp72,93 triliun. Anggaran subsidi energi dalam APBN 2022 dialokasikan untuk subsidi jenis BBM tertentu sebesar Rp11,3 triliun, subsidi LPG tabung 3 kg sebesar Rp66,3 triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp56,5 triliun. Asumsi harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian crude price/ICP*) dalam APBN 2022 sebesar US\$63 per barel, sementara saat ini harga minyak mentah dalam tiga bulan terakhir mencapai US\$100 per barel.

Realisasi subsidi BBM di kuartal I-2022 mencapai Rp3,2 triliun, atau melonjak 59,38 persen dari kuartal I-2021 yang sebesar Rp1,3 triliun. Realisasi subsidi LPG 3 kg di kuartal I-2022 juga mengalami kenaikan, yaitu mencapai Rp21,6 triliun, naik 52,78 persen dari kuartal I-2021 yang sebesar Rp10,2 triliun. Total subsidi energi per kuartal I-2022 telah mencapai Rp32,52 triliun, yang mencakup subsidi BBM, LPG tabung 3 kg, dan subsidi listrik. Angka tersebut tumbuh 80,1 persen *year on year* (yoy) dibandingkan dengan kuartal I-2021. Pemerintah berencana untuk melakukan perubahan APBN 2022, untuk sektor energi terkait asumsi harga minyak mentah (ICP), subsidi BBM, subsidi LPG 3 kilogram (kg), dan subsidi listrik. Kenaikan ICP juga memberikan dampak terhadap subsidi dan kompensasi listrik, mengingat masih terdapat penggunaan BBM dalam pembangkit listrik. Melonjaknya ICP juga berdampak pada sektor lainnya khususnya transportasi dan industri yang mengkonsumsi BBM nonsubsidi.

Menteri ESDM menyatakan bahwa pemerintah belum berencana untuk menaikkan harga jual Peralite maupun tarif listrik dalam waktu dekat, karena masih menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat, serta menjaga tingkat inflasi. Pemerintah perlu berhati-hati dalam menaikkan harga BBM dan LPG dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, menjaga pemulihan ekonomi seiring meredanya pandemi, dan pengendalian potensi peningkatan inflasi. Hal lainnya adalah meredam gejolak sosial masyarakat mengingat naiknya harga komoditas energi juga akan berpengaruh pada naiknya harga komoditas nonenergi. Di sisi lain, Pertamina sebagai BUMN yang menjalankan fungsi pelayanan publik (PSO) dalam mendistribusikan BBM dan LPG merasakan dampak terhadap kenaikan ICP. Harga jual eceran semua produk Pertamina masih di bawah harga keekonomian sehingga menekan kesehatan keuangan Pertamina.

Subsidi energi membuat Indonesia semakin sulit melepaskan ketergantungan terhadap energi fosil, padahal saat ini Indonesia sedang berupaya mencapai target bauran energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada tahun 2025. Agar pengembangan EBT dapat berjalan baik diperlukan kebijakan yang mendukung percepatan pengembangan EBT agar harganya dapat bersaing dengan energi fosil.

Postur subsidi energi ke depan diharapkan dapat selaras dengan arah dan kebijakan pemerintah dalam upaya transisi energi dan tujuan pembangunan berkelanjutan, antara lain dengan penyesuaian harga BBM secara bertahap mendekati harga keekonomiannya yang diikuti dengan perbaikan skema subsidi yang efektif, dengan sasaran kelompok masyarakat yang paling rentan secara ekonomi. Perubahan skema subsidi, dari subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis orang atau penerima manfaat agar subsidi menjadi lebih tepat sasaran.

Pengurangan subsidi energi dan dialihkan untuk sektor ekonomi strategis, misalnya untuk pengembangan ekosistem industri EBT, serta akselerasi penggunaan kendaraan listrik yang ramah lingkungan dengan dukungan regulasi maupun insentif agar harganya dapat kompetitif. Reformasi kebijakan subsidi perlu dilakukan agar porsi subsidi energi dalam APBN dapat semakin berkurang sehingga alokasi anggaran dapat dialihkan untuk sektor yang lebih strategis dan produktif, serta mendorong transisi energi di Indonesia.

Atensi DPR

Kenaikan harga komoditas energi dan dampaknya terhadap subsidi energi perlu mendapat perhatian oleh DPR RI, khususnya Komisi VII DPR RI yang membidangi energi. Dari sisi pengawasan, Komisi VII DPR RI perlu mengawal agar pemerintah mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan skema subsidi agar lebih efektif dan tepat sasaran, yaitu untuk kelompok masyarakat yang paling rentan secara ekonomi, serta melakukan reformasi kebijakan subsidi energi agar porsi subsidi energi dalam APBN dapat semakin berkurang. Dengan demikian maka alokasi anggaran APBN dapat dialihkan untuk sektor yang lebih strategis dan produktif, serta mendorong percepatan transisi energi di Indonesia.

Sumber

kompas.id, 14 Mei 2022;
Kontan, 12 Mei 2022;
Kontan Mingguan, 16-25 Mei 2022;
Media Indonesia, 12 Mei 2022;
news.detik.com, 11 Mei 2022; dan
republika.co.id, 17 Mei 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Monika Suhayati
Nidya Waras Sayekti
Edmira Rivani
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikh P.S.
Fieka Nurul A.